



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



F I S I P
UNIVERSITAS TADULAKO

**KURIKULUM OBE
PROGRAM STUDI (S1) SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
TAHUN 2023 (REVISI 2024)**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



DOKUMEN

**Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



UNIVERSITAS TADULAKO
Tahun 2024

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Ketua Tim	: Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si
NIDN	: 0020037504
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Tadulako

**UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024**

TIM PENYUSUN KURIKULUM

Ketua Tim Penyusun : Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si

Sekretaris : Sisrilnardi, S.IP, M.Si

Anggota :

- 1. Dr. Muh. Nawawi, M.Si**
- 2. Dr. Muhammad Arief, S.IP, M.Si**
- 3. Dr. Mahfuzat, S.IP, M.Si**
- 4. Dr. Nurhannis, M.Si**
- 5. Dr. Yunus, S.Sos, M.Si**
- 6. Rusmawaty Bte. Rusdin, S.Sos, MA**

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur pada pemilik semesta, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada tim penyusun kurikulum, sehingga Dokumen Kurikulum Outcome Base Education Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan Tahun 2023 Fisip - Universitas Tadulako (Revisi Tahun 2024).

Penyusunan kurikulum ini menjadi kewajiban yang diinstruksikan Rektor Universitas Tadulako tentang perlunya pembaharuan kurikulum program studi di lingkup Universitas Tadulako setiap empat tahun sekali, juga merespon perubahan kurikulum di perguruan tinggi yang juga mengalami pembaharuan menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*).

Kurikulum periode 2024-2027 merupakan rekonstruksi terhadap kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad sebelumnya yang disusun pada tahun 2023. Pembaharuan kurikulum ini ditujukan agar terjadi sinkronisasi antara program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Visi dan Misi Universitas Tadulako Tahun 2020-2045, Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pengelolaan pengajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako dan Kurikulum KAPSIPI berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Dokumen Kurikulum S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad ini menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan akademik selama empat tahun kedepan, dan tentu kurikulum ini dapat diubah untuk dilakukan penyesuaian kembali jika dianggap perlu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan universitas, pimpinan fakultas, rekan - rekan dosen serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Palu, Juli 2024

Ketua Tim

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Tadulako ☒ PTN ☐ PTS
2	Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Administrasi
4	Program Studi	Ilmu Pemerintahan
5	Status Akreditasi	Baik Sekali (3694/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024)
6	Jumlah Mahasiswa	1.050
7	Jumlah Dosen	22
8	Alamat Prodi	Jl. Soekarno Hatta, Km. 9, Palu.
9	Telpn	(0451) 429378
10	Web PRODI/PT	https://pemerintahan.fisip.untad.ac.id/

**KURIKULUM OUTCOME BASE EDUCATION KAMPUS MERDEKA,
MERDEKA BELAJAR PROGRAM STUDI (S1) ILMU PEMERINTAHAN
TAHUN 2023
FISIP-UNIVERSITAS TADULAKO
(REVISI TAHUN 2024)**

1. LANDASAN

1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014) , bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu me ningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976) Landasan filosofi pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Tadulako mengacu pada tiga nilai filosofi, yaitu pancasila, kearifan lokal dan nilai yang terkandung dalam filsafat ilmu pemerintahan.

Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membawah nilai-niai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, kebijaksanaan dan keadilan. Artinya, kurikulum pendikan tinggi yang dibuat harus membawa peserta didik agar memiliki sikap ketaatan kepada Tuhan-NYA, sikap humanisme dan menghormati hak asasi, memelihara keutuhan nasional, memiliki kebijaksanaan dan bersikap adil. Nilai-nilai pancasila tersebut dijewantahkan kembali dalam sistem hukum nasional mulai dari UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2012, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berlaku. Sistem hukum nasional inilah yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum.

Kedua, nilai kearifan lokal yang melandasi dalam penyusunan kurikulum prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad adalah nilai-nilai ke-Tadulako-an. Tadulako dalam konsep dan persepsi komunitas orang Kaili adalah “julukan atau personifikasi” bagi siapa saja yang berhasil pulang membawa kemenangan dalam perang. Tadulako juga, memiliki makna bagi mereka yang berhasil dalam tugas membela dan mempertahankan “kedaulatan” Kerajaan, dari serangan atau ancaman dari luar. Tadulako secara kongkrit berarti pemimpin memiliki sifat-sifat keutamaan (adil, bijaksana, jujur, cerdas, berani, bersemangat, pengayom, pembela kebenaran). Mengacu pada nilai ke-Tadulako-an itu, maka peserta didik pada program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebijaksanaan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, semangat, mengayomi dan membela kebenaran.

Ketiga, filsafat ilmu pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan memiliki aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah menyangkut pengkajian suatu ilmu pengetahuan dengan pembatasan lingkup penelaahannya. Epistemologi meliputi persoalan-persoalan bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan? bagaimana prosedurnya?

Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Sedangkan aksiologi menyangkut tujuan dan nilai penggunaan ilmu, dimana pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia (Suriasumantri, 2007).

Secara ontologi, ilmu pemerintahan mempelajari tentang negara, namun secara forma (kekhususan) mengkaji tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah, *governance* (tata kelola), hubungan antar lembaga-lembaga negara, fungsi pemerintah, aktivitas pemerintah dan gejala-gejala pemerintahan. Selanjutnya, epistemologi ilmu pemerintahan dipelajari melalui pendekatan ilmiah kualitatif dan kuantitatif atau mengabungkan keduanya. Dalam aspek kemanfaatan (ontologi), kehadiran ilmu pemerintahan diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta menemukan dan mengembangkan teori-teori pemerintahan untuk memperkaya khasanah keilmuan.

Disamping nilai-nilai di atas, landasan penyusunan kurikulum ilmu pemerintahan juga mengacu pada beberapa filosofi, yakni filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Filosofi perenialisme, didasarkan pada aspek realisme, memiliki tujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi pribadi yang rasional. Dalam aspek perenialisme, fokus kurikulumnya adalah penekanan pada matakuliah klasik dan analisis berbagai referensi atau literatur. Filosofi esensialisme, yang didasarkan pada aspek realisme dan idealisme, bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa dan mendidik mahasiswa agar menjadi orang yang kompeten. Filosofi esensialisme menekankan pada keterampilan pokok *reading*, *writing*, dan aritmatika, serta matakuliah esensial. Filosofi progresivisme yang didasarkan pada aspek pragmatisme, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial demokratis yang memfokuskan kurikulum berdasarkan minat dan bakat mahasiswa, pengembangan kemampuan individu agar mampu melakukan pemecahan masalah. Filosofi rekonstruksionisme yang juga didasarkan pada aspek pragmatisme, memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Fokus dari filosofi ini adalah penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset.

1.2. Landasan Sosiologis

Program pendidikan disusun dan dipengaruhi oleh nilai, masalah, kebutuhan, dan tantangan dalam masyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Pengembangan kurikulum sebaiknya mengacu kepada aspek sosiologis dikarenakan peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat baik suatu

sistem maupun subsistem berikutnya dapat memengaruhi proses pendidikan, oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat (Hamalik, 2008).

Pengembangan kurikulum prodi ilmu pemerintahan FISIP Untad mengacu pada aspek sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah yang multi etnik, multi agama, multi budaya, dan multi bencana. Dalam konteks masyarakat yang beragam itu, maka kurikulum prodi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang mampu memelihara stabilitas sosial, mewujudkan perdamaian dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah rentan bencana, maka kurikulum ilmu pemerintahan diarahkan untuk berkontribusi pada kesiapsiagaan terhadap berbagai bentuk bencana (alam maupun non alam) dan tata Kelola kebencanaan (*disaster governance*). Disamping itu, kondisi sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi terutama masuknya investasi asing di Sulawesi Tengah.

Pada kondisi itu, maka kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Ki Hadjar Dewantoro, menekan bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia mengadung tiga prinsip yaitu Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan terdapat tiga sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu: logika, estetika, dan etika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran, estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan, dan etika berkaitan dengan aspek nilai. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika (pikiran). Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks inilah kurikulum program studi ilmu pemerintahan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat tersebut, tidak hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu program studi ilmu pemerintahan sebagai pembina dan pelaksana kurikulum melakukan evaluasi terhadap kurikulum guna mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada peserta didiknya relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua materi yang ada dalam kurikulum, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan (*stake holder*) yang di sinkronisasikan dalam berbagai mata kuliah yang ditempuh oleh

mahasiswa, sehingga hasil belajar yang dicapai dapat lebih bermakna dalam kehidupan. Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat, yang diwujudkan dengan menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran.

1.3. Landasan Psikologis

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia/peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan.

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan/program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan dilandasi oleh asumsi - asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan harus menumbuhkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik peserta didik.

Aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kegiatan mental (otak). Aspek kognitif terkait dengan kemampuan intelektual atau kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hasil belajar dalam aspek kognitif erat kaitannya dengan bertambahnya wawasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih baik setelah menempuh program pelatihan. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai (value). Istilah sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Pendidikan afektif sangat penting, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu anak didik mampu dan mau mengamalkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek afektif terkait dengan kemauan seseorang dalam menerima dan mengamalkan nilai dan norma yang dipelajari.

Aspek, psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan. Dalam pengembangannya, pendidikan psikomotorik disamping proses menggerakkan otot, juga telah berkembang dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Aspek psikomotorik sebagai hasil belajar berhubungan dengan keterampilan fisik yang dimiliki oleh

seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Belajar akan membuat seseorang memiliki keterampilan dalam melakukan sesuatu tugas dan pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aspek psikomotorik erat kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.

Kurikulum harus mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

1.4. Landasan Historis

Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk lebih mengenali sejarah masyarakat Sulawesi Tengah dari masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan hingga era reformasi. Penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Sulaeman Mamar, guru besar FISIP Untad menyebutkan Propinsi Sulawesi Tengah dahulu merupakan wilayah pemerintahan raja-raja, dan seiring dengan perkembangan masyarakat melalui proses migrasi, Sulawesi Tengah telah dihuni oleh beraneka macam suku bangsa seperti: Suku Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Minang, Jawa, Minahasa, Arab, India, Cina dan suku bangsa penduduk. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 10 macam suku terasing yang menempati daerah pegunungan dan 12 suku bangsa asli yang bermukim di daerah daratan dan lembah. Ke 12 suku bangsa asli tersebut ialah: Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Tomini, Bungku, Toli-Toli, Buol, Balantak, Lore dan Saluan. Di antara suku-suku bangsa asli tersebut, Kaili merupakan suku bangsa yang terbesar jumlahnya asli (Mamar dkk, 1984).

Menurut sejarawan Universitas Tadulako, Haliadi Sadi (2017) memasuki abad 20 perkembangan Sulawesi Tengah mengalami transformasi dan terbentuk masyarakat baru. Dikisahkannya bahwa meski masih ada masyarakat tradisional yang menghuni gunung-gunung dan lembah, namun jumlahnya semakin berkurang seiring dengan sentuhan pembangunan dan migrasi penduduk baik secara alamiah maupun melalui proses transmigrasi. Dengan adanya transmigrasi masyarakat kota menuju ke desa-desa yang tersebar di pedalaman Sulawesi Tengah menjadikan daerah pedalaman berubah sebagai *rural-metropolitan* yaitu desa yang menampilkan wajah kehidupan masyarakat perkotaan. Di abad 21 perkembangan masyarakat Sulawesi Tengah mulai dipengaruhi oleh pertumbuhan kapitalisme. Dr. M. Nur Alamsyah, dosen FISIP Universitas Tadulako menggambarkan perubahan yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali, pasca industrialisasi nikel. Digambarkannya bahwa penduduk desa di Morowali yang dahulunya bekerja sebagai petani dan

nelayan mulai beralih pada masyarakat industri yang bekerja sebagai buruh pabrik nikel yang digerakkan oleh investasi asing, khususnya Cina. Perubahan masyarakat ini menurut Nur Alamsyah (2021) tidak hanya mengubah wajah desa menjadi kota, namun juga telah menyebabkan kekumuhan seiring dengan kepadatan penduduk akibat migrasi sosial masyarakat dari luar Sulawesi Tengah.

Sejarah perkembangan Sulawesi Tengah juga diwarnai oleh kejadian bencana baik alam maupun non alam (sosial). Bencana alam menjadi bagian dari fenomena sosial Sulawesi Tengah, ini ditandai dengan penamaan wilayah, tempat, atraksi budaya bagi masyarakat lokal, seperti: kampung *nalodo* (tanah yang tenggelam), *tanahruntuh* (tanah yang runtuh), *rogo* (hancur), *beka* (tanah terbelah) dan *to palu'e* (tanah yang terangkat). Penamaan ini merupakan konstruksi kehidupan yang dihadapi masyarakat sebagai konsekuensi wilayah yang dilalui oleh sesar Palu Koro. Nilai-nilai penjagaan konflik di Sulawesi Tengah merupakan elemen pokok yang dibangun dari kebudayaan sebagaimana slogan lokal, seperti: *Sintuwu maliuntinuvu* yang dimaknai untuk selalu satu, damai, dalam bermasyarakat agar tercipta hubungan yang aman dan sejahtera dalam warga. *Sintuwu Maroso* yang dimaknai bersatu kita kuat.

Perjalanan sejarah dari masa ke masa sebagaimana tergambar dari perubahan sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang dikisahkan oleh para sejarawan dan peneliti di atas, maka pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk memahami sejarah, belajar dari sejarah, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan zaman. Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan FISIP Untad:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Landasan-landasan hukum dari rekonstruksi kurikulum secara lengkap dijabarkan sebagai berikut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
16. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 2934/UN28/KP/2013 Tentang Penetapan Siklus Peninjauan Kurikulum dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
19. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 4596/UN28/KL/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Tadulako.
20. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 1349/UN28/KR/2015 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Perguruan Tinggi Berorientasi KKNI di Universitas Tadulako.

21. Keputusan Rektor Untad No. 1319/ UN.28/ KR/2024, Penetapan SKS Mata Kuliah Wajib Nasional, Umum, Dan Sains Dasar di Lingkungan Untad

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012.

Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian.

Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Kebijakan terbaru adalah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Tadulako memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya.

Dinamika perkembangan keilmuan pemerintahan terwadahi melalui Kesatuan Program Studi ilmu pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh program studi Ilmu pemerintahan di Indonesia. Melalui workshop kurikulum yang dilaksanakan dilakukan perubahan mendasar kurikulum yang berorientasi pada outcome base education (OBE) yang mengadaptasi kebijakan Merdeka Belajar kampus merdeka (MBKM).

2. VISI DAN MISI PS (S1) ILMU PEMERINTAHAN

Visi

“Unggul dan Bertaraf Internasional Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan Yang Adaptif Dengan Perubahan Berwawasan Lingkungan Melalui Pendidikan,

Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat”.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan yang unggul bertaraf internasional dan adaptif dengan fenomena perubahan lingkungan hidup lokal dan global.
2. Melaksanakan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pemerintahan, kolaboratif dengan peneliti nasional dan internasional berwawasan lingkungan yang diadaptasikan untuk kemajuan daerah nasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada bidang pemerintahan berbasis hasil kajian dan inovasi penelitian sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang responsif.
4. Mendorong terwujudnya atmosfir birokrasi pemerintahan yang reformis dan adaptif terhadap perubahan menuju Indonesia maju.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Pemerintah	Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai praktisi pemerintah pada lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
2	Analisis Kebijakan	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai analisis kebijakan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan sektor publik dan swasta.
3	Analisis perencanaan	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai analisis perencanaan bidang pemerintahan
4	Peneliti/asisten peneliti	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai peneliti/asisten peneliti bidang pemerintahan
5	Fasilitator pemberdayaan	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai penggerak pada organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan,

		pengurus partai politik, dan LSM.
--	--	-----------------------------------

4. BAHAN KAJIAN

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK 1	Politik dan Konflik	Mengkaji tentang politik, pemilihan, demokrasi, kepemimpinan pemerintahan, teori dan konsep konflik, typologi konflik, implikasi konflik, tata kelola konflik dan pencegahan serta dinamika politik dan konflik di Indonesia.
BK 2	Kebencanaan	Mengkaji tentang bencana, bentuk bencana alam dan non-alam, pengelolaan bencana, bencana, kegiatan pencegahan bencana, mitigasi, penanganan, rekonstruksi bencana, kebencanaan di Indonesia, strategi manajemen bencana dan dinamika kebencanaan local, nasional, dan global.
BK 3	Lingkungan	Mengkaji fenomena lingkungan local, nasional dan global, strategi pembangunan berkelanjutan, ekologi pemerintahan, perencanaan Pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
BK 4	Pemerintahan	Mengkaji teori, konsep, bentuk kekuasaan dan kewenangan pemerintah, dasar pemerintahan, kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan <i>auxiliary state</i> , sistem dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah serta teknik-teknik pemerintahan.
BK 5	Desa	Mengkaji tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, BUMDES, Pilkades, desa adat, digitalisasi, inovasi desa, otonomi desa dan kelembagaan desa.
BK 6	Keuangan Daerah	Mengkaji teori dan konsep mengenai desentralisasi fiskal, tata kelola keuangan pemerintahan daerah dan penyalahgunaan keuangan daerah.
BK 7	Konstitusi	Kajian ini memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem dilihat dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis selain itu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan konstiusionalisme termasuk didalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. serta berkaitan dengan hukum tata pemerintahan.

BK 8	Pemerintahan local	Mengkaji teori dan konsep pemerintahan lokal, politik lokal, kekuatan politik lokal, dinamika, kepemimpinan, Pilkada, dan partai politik.
BK 9	Desentralisasi	Mengkaji tentang bentuk-bentuk otonomi mulai dari desentralisasi, dekosentrasi, otonomi daerah dan otonomi khusus
BK 10	Legislasi	Mengkaji tentang proses pembuatan undang-undang, perumusan kebijakan, peraturan daerah dan dinamika politik proses legislasi, struktur lembaga legislatif dan fungsi legislatif.
BK 11	Perencanaan Pembangunan	Mengkaji tentang teori sistem, pendekatan perencanaan, model perencanaan, proses perencanaan, sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan, permasalahan perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi perencanaan
BK 12	Pemberdayaan dan partisipasi	Mengkaji tentang konsep, teknik kelembagaan masyarakat, proses pemberdayaan dan partisipasi, masyarakat sipil, gender, fenomena sosial budaya yang mempengaruhi pemerintahan.
BK 13	Digital government	Mengkaji tentang teknologi informasi pemerintah tata kelola, pemanfaatan big data dalam penyelenggaraan pemerintahan secara teoritis maupun empiris.

5. RUMUSAN CPL

Tabel-2: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
		Sikap	
P1	Praktisi pemerintah.	S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan Pancasila.
P2	Analisis kebijakan.	S2	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.
P3	Analisis perencanaan		Berkemandirian, profesional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.
P4	Peneliti/ asisten peneliti	S3	
P5	Fasilitator pemberdayaan		
		Keterampilan Umum	

		KU1	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.
		KU2	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.
		KU3	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.
		Ketrampilan Khusus	
		KK1	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiahan maupun kearifan local Masyarakat.
		KK2	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara-cara ilmiah.
		KK3	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara professional.
		Penguasaan Pengetahuan	
		PP1	Menguasai konsep dasar, teori social, politik, pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, pemilihan, kebencanaan, Masyarakat sipil dan lingkungan,

		PP2	Menguasai konsep dan praktik Hukum pemerintahan, implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan, strategi dan metode keilmuan dan metodologi pemerintahan, civil society, perencanaan dan Pembangunan, metode penelitian, <i>internet of things</i> , big data.
		PP3	Menguasai Konsep, teori dan praktik politik, kebijakan, tata Kelola keuangan, sumber daya pemerintahan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, manajemen kebencanaan, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, pemilihan, kewenangan, hukum pemerintahan, hubungan antar kelembagaan pemerintahan dan teknologi pemerintahan serta pengelolaan konflik.

6. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

CPL Prodi		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8	BK9	BK10	BK11	BK12	BK13
Sikap														
S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan pancasila.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

S2	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
S3	Berkemandirian, professional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Keterampilan Umum															
KU1	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KU2	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KU3	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.													
Ketrampilan Khusus														
KK1	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiah maupun kearifan local Masyarakat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KK2	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara-cara ilmiah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KK3	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara professional.													
Penguasaan Pengetahuan														
PP1	Menguasai konsep dasar, teori social, politik, pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, pemilihan, kebencanaan, Masyarakat sipil dan lingkungan,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PP2	Menguasai konsep dan praktik Hukum pemerintahan, implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan, strategi dan metode keilmuan dan metodologi pemerintahan, civil society, perencanaan dan Pembangunan, metode penelitian, <i>internet of things</i> , big data.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PP3	Menguasai Konsep, teori dan praktik politik, kebijakan, tata Kelola keuangan, sumber daya pemerintahan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, manajemen kebencanaan, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, pemilihan, kewenangan, hukum pemerintahan, hubungan antar kelembagaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

pemerintahan dan teknologi pemerintahan serta pengelolaan konflik.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Sebaran Mata Kuliah Ps (S1) Ilmu Pemerintahan

SEMESTER I			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	U00131002	Pendidikan Pancasila	2
2	B04231001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	3
3	B0415102	Pengantar Ilmu Politik	3
4	B04231002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3
5	U00131009	Bahasa Inggris	2
6	U00131003	Bahasa Indonesia	2
7	U00131001	Pendidikan Agama	2
8	U00131005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2
9	B0015101	Ko-Kurikuler I (Beladiri Karate) Praktikum	1
Jumlah			20
SEMESTER II			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415103	Sistem Politik Indonesia	3
2	U00131004	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	U00131007	Kewirausahaan (Praktikum)	2
4	B04231003	Pemerintahan Nasional	3
5	B04231004	Sosiologi Pemerintahan	3
6	B0415134	Filsafat Ilmu	3
7	B0015102	Kokurikuler II (Praktikum)	1
8	B04241001	Politik Lingkungan (PPL)	3
Jumlah			20
SEMESTER III			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	U00131008	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum)	2
2	B04231005	Hukum Pemerintahan (PPL)	3
3	B04231006	Pemerintahan Daerah	3
4	B0415117	Pemerintahan Desa (PPL)	3
5	B0415123	Etika Pemerintahan	3

6	B04231007	Birokrasi Pemerintahan	3
7	B0415132	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
8	B0415130	Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)	3
Jumlah			23

SEMESTER IV

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B04231008	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	3
2	B04231009	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	3
3	B04231010	Digital Government (PPL)	3
4	B0415115	Tata Kelola SDM Pemerintahan	3
5	B04231011	Pelayanan Sektor Publik	3
6	B04231012	Perencanaan Pembangunan (PPL)	3
7	B0415116	Kepemimpinan Pemerintahan	3
8	B04231013	Kebijakan Sektor Publik	3
Jumlah			24

SEMESTER V

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B04231014	Tata Kelola Penanggulangan Bencana (PPL)	3
2	B0415133	Ekologi Pemerintahan	3
3	B04231015	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Praktikum)	3
4	B0415108	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia	3
5	B04231016	IoT & Big Data (Praktikum)	3
6	B4015106	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPL)	3
7	B04241002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan	3
8		Pilihan	3
Jumlah			24

SEMESTER VI

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415118	Pengambilan Keputusan Stratejik	3
2	B0415125	Pemerintahan dan Politik lokal	3
3	B0415114	Manajemen Konflik	3
4	B0415113	Kajian Good Governance	3
5	B04231017	Civil Society & Demokrasi (PPL)	3
6	B04231018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan (PPL)	3
7		Pilihan	3
Jumlah			21

SEMESTER VII			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0015103	Kuliah kerja nyata (KKN)	4
2	B04231019	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah	2
3		Pilihan	3
Jumlah			9
SEMESTER VIII			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0015104	Skripsi	4
Jumlah			4
TOTAL SKS			145

MATA KULIAH PILIHAN			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415112	Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia	3
2	B04231020	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	3
3	B04231021	Statistik dan Data Science	3
4	B0415135	Psikologi Pemerintahan	3
5	B04241003	Resolusi Konflik	3
6	B04231022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa	3
7	B04231023	Studi Gender	3
8	B04231024	Kajian Kedaruratan Bencana	3
9	B0415129	Seminar Masalah pemerintahan	3
Jumlah			27

8. Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Tabel 8.1. Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Semtr	SKS	Jumlah MK	KELOMPOK MATA KULIAH																
			Wajib							Pilihan							MKDU		
VIII	4	1	Skripsi/ Tugas Akhir																
VII	9	3	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah						Studi Gender	Kajian Kedaruratan Bencana	Seminar Masalah pemerintahan							
Semtr	SKS	Jumlah MK	KELOMPOK MATA KULIAH																
			Wajib							Pilihan							MKDU		

VI	21	7	Pengambilan Keputusan Strategik	Pemerintahan dan Politik Lokal	Manajemen Konflik	Kajian Good Governance	Civil Society & Demokrasi	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan			Psikologi Pemerintahan	Resolusi Konflik	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang/Jasa							
V	24	8	Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Ekologi Pemerintahan	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia	IoT & Big Data	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Tata Kelola komunikasi pemerintahan		Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	Statistik dan Data Science							
Smt			KELOMPOK MATA KULIAH																	
			Wajib									Pilihan						MKDU		
IV	24	8	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	Digital Government	Tata Kelola SDM Pemerintahan	Pelayanan Sektor Publik	Perencanaan Pembangunan	Kepemimpinan Pemerintahan	Kebijakan Sektor Publik										
III	23	8	Hukum Pemerintahan	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Desa	Etika Pemerintahan	Birokrasi Pemerintahan	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan								Kajian Lingkungan Hidup			
Smt			KELOMPOK MATA KULIAH																	
			Wajib									Pilihan						MKDU		
II	20	9	Pemerintahan Nasional	Sosiologi Pemerintahan	Filsafat Ilmu	Ko Kurikuler II	Politik lingkungan	Sistem politik Indonesia									Kewirausahaan	Pendidikan Kewarganegaraan		
I	20	8	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	Pengantar Ilmu Politik	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	Ko Kurikuler (Bela Diri Karate)											Pendidikan Pancasila	Bahasa Inggris	Pendidikan Agama	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

9. Struktur Kurikulum

Susunan daftar mata kuliah yang direncanakan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako yang ditawarkan di tiap semester:

ON	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam	Capaian Pembelajaran Lulusan				RPS	Metode Pembelajaran	Keterangan (pelaksanaan MBKM dalam PT Pengusul)	Keterangan (pelaksanaan MBKM di Luar PT Pengusul)
				Kuliah/ Ceramah/	Seminar	Praktikum/ Praktiki/ Praktikum Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus				
1	U00131002	Pendidikan Pancasila		2	0	0	1,5	√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak

2	B04231001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial		3	0	0	2,15	√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
3	B0415102	Pengantar Ilmu Politik		3	0	0	2,15	√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B04231002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan		3	0	0	2,15	√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
5	U00131009	Bahasa Inggris		1	0	1	2,15	√	√	√		√	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
6	U00131003	Bahasa Indonesia		1	0	1	2,15	√	√	√		√	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
7	U00131001	Pendidikan Agama		1	0	1	2,15	√	√	√		√	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
8	B0015101	Ko-Kurikuler I (Beladiri Karate)		0	0	1	45	√	√		√	√	praktek	Ya	Ya
9	U00131005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi (dr smster 2)		2	0	0	1,5	√	√	√		√	kuliah	Ya	Tidak
Total Semester 1				16	0	4									
1	B0415103	Sistem Politik Indonesia		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Tidak	Tidak
2	U00131004	Pendidikan Kewarganegaraan		2	0	0		√	√	√		√	Kuliah	Ya	Ya
3	U00131007	Kewirausahaan /Praktek		1	0	1		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B04231003	Pemerintahan Nasional (KAPSIPI)	Ya	2	1	0		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
5	B04241001	Politik Lingkungan /PPL	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231004	Sosiologi Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
7	B0415134	Filsafat Ilmu		3	0	0		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
8	B0015102	Kokurikuler II		0	0	1		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
Total Semester 2				13	4	3									
1	U00131008	Kajian Lingkungan Hidup/Praktek	Ya	1	0	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
2	B04231005	Hukum Pemerintahan (PPL)	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL	Ya	Ya

3	B04231006	Pemerintahan Daerah	Ya	2	1	0		√	√	√		√	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B0415117	Pemerintahan Desa (PPL)	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL	Ya	Ya
5	B0415123	Etika Pemerintahan (KAPSIPI)	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
6	B04231007	Birokrasi Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√		√	Kuliah		
7	B0415132	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah		
8	B0415130	Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
													Praktikum		
Total Semester 3				12	7	4									
1	B04231008	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
2	B04231009	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
3	B04231010	Digital Government (PPL)	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL	Ya	Ya
4	B0415115	Tata Kelola SDM Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
5	B04231011	Pelayanan Sektor Publik	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231012	Perencanaan Pembangunan (PPL)	Ya	1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL	Ya	Ya
7	B0415116	Kepemimpinan Pemerintahan	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
8	B04231013	Kebijakan Sektor Publik	Ya	2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
Total Semester 4				14	8	2									
1	B04231014	Tata Kelola Bencana/PPL		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL		
2	B0415133	Ekologi Pemerintahan		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
3	B04231015	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Praktek)		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
4	B0415108	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
5	B0415113	Kajian Good Governance		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,		

6	B4015106	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPL)		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah		
7	B04241002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
8		Pilihan		3	0	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
Total Semester V				14	7	3									
1	B0415118	Pengambilan Kebijakan Strategik		3	0	0		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
													Praktikum		
2	B0415125	Pemerintahan dan Politik Lokal		3	0	0		√	√	√		√	Kuliah		
3	B0415114	Manajemen Konflik		3	0	0		√	√	√		√	Kuliah		
4	B04231016	IoT & Big Data (Praktek)		2	0	1		√	√	√		√	Kuliah		
5	B04231017	Civil Society & Demokrasi		3	0	0		√	√	√		√	Kuliah		
6	B04231018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan/PPL		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah, PPL		
7		Pilihan		3	0	0							Praktikum		
Total Semester VI				18	1	2									
1	B0015103	Kuliah kerja nyata (KKN)		0	1	3		√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
													Praktikum		
2	B04231019	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah		0	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
3		Pilihan		3	0	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
Total Semester VII				3	2	4									
1	B0015104	Skripsi						√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
				0	2	2							Praktikum		
Total Semester VIII				0	2	2									
Mata Kuliah Pilihan															
1	B0415112	Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya

2	B04231020	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
3	B04231021	Statistik dan Data Science		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
4	B0415135	Psikologi Pemerintahan		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
5	B04241003	Resolusi Konflik		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
7	B04231023	Studi Gender		2	1	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
8	B04231024	Kajian Kedaruratan Bencana		1	1	1		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
9	B0415129	Seminar Masalah pemerintahan		1	2	0		√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
Total SKS				13	10	4									
Jumlah				145											

10. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian Dan Materi Pembelajaran

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS	CPL yang dibebankan	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
1	U00131002	Pendidikan Pancasila	2	SIKAP: S2, S3,S4, S5, S6, S7,S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KK14, KK15 PENGETAHUAN P1,P3	Bahan Kajian: BK1,BK2 Materi Pembelajaran: - landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila - Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia - Pancasila sistem filsafat Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional. - Pancasila dalam konteks ketatanegaraan R.I. - Pancasila sebagai

					paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2	B0423 1001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	3	SIKAP: S4,, S5 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK12, KK13 PENGETAHUAN : PP1, PP3, PP10	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Teori Politik 2. Filsafat Politik Plato 3. Filsafat Politik Aristoteles 4. Pemikiran Politik John Locke 5. Liberalisme 6. Sosialisme 7. Marxisme Dan Komunisme 8. Sosial Demokrat 9. Demokrasi 10. Teori pilihan rasional formal 11. Teori sistem dan sistem politik 12. <i>Civil Society</i> 13. Feminisme dalam ilmu politik.
3	B0415 102	Pengantar Ilmu Politik	3	SIKAP: S4 KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU3, KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK13 PENGETAHUAN: PP1, PP3, PP7, PP16	Bahan Kajian: BK 9 Materi Pembelajaran: 1. Konsep-konsep Dasar dalam Ilmu Politik 2. Pendekatan- pendekatan da 3. Konsep negara dan kekuasaan 4. lembaga legislatif dan <i>trias politica</i> 5. Lembaga Yudikatif 6. Partai Politik dan Sistem Kepartaian 7. Partisipasi Politik, 8. Pemilu dan Sistem Pemilu 9. Ideologi politik 10. Hak Asasi Manusia
4	B0423 1002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3	SIKAP: S9 KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU3, KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK13, KK15 PENGETAHUAN: PP1, PP3, PP4, PP10	Bahan Kajian: BK 9 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dasar Ilmu Pemerintahan 2. Pengertian, obyek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan 3. Teori dasar Bentuk & Sistem Pemerintahan Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain 5. Teori Kekuasaan, Kewenangan & Legitimasi 6. Struktur Pemerintah umum

					7. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan 8. Problematika dan penelitian pemerintahan 9. Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan
5	U0013 1009	Bahasa Inggris	2	SIKAP: S5 KETERAMPILAN UMUM: KU13 KETERAMPILAN KHUSUS: KK5 PENGETAHUAN: PP13	Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran: 1. Bahasa Inggris akademis 2. Keterampilan berbicara dan diskusi 3. Kosa kata khusus ilmu pemerintahan 4. Kebijakan dan analisis teks 5. Keterampilan menyimak 6. Penyuntingan dan revisi teks
6	U0013 1003	Bahasa Indonesia	2	SIKAP: S4 KETERAMPILAN UMUM: KU4 KETERAMPILAN KHUSUS: KK5 PENGETAHUAN: PP13	Bahan Kajian: BK1, BK2 Materi Pembelajaran: 1. Peranan dan fungsi bahasa Indonesia 2. Ragam Bahasa EYD dan Tanda Baca 3. Kalimat efektif 4. Kutipan 5. Abstrak dan daftar pustaka 6. kegiatan menulis di perguruan tinggi
7	U0013 1001	Pendidikan Agama	2	SIKAP: S1, S2, S5 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK16 PENGETAHUAN: PP22	Bahan Kajian: BK1 Materi Pembelajaran: 1. Fungsi Agama dalam Kehidupan Manusia 2. Dakwah dan Pemberdayaan Umat Islam Indonesia di Berbagai Bidang 3. Sistem Ekonomi Islam 4. Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama 5. Islam dan budaya 6. Islam dan pengembangan Islam dan Politik 7. Hukum Islam di Indonesia
8	B0015 101	Ko-Kurikuler I (Beladiri Karate)/	1	SIKAP: S1, S2, S3 KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU2, KU5, KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK10, KK14, KK16	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Teknik dasar karate 2. Kata (<i>form</i>) 3. Kumite 4. Kondisi fisik dan mental 5. Budaya dan etika

		(Praktek)		PENGETAHUAN: PP27	karate 6. Demonstrasi dan kompetisi
9	B0424 1001	Politik Lingkungan (PPL)	3	SIKAP: S2 S7, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU11 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK16 PENGETAHUAN: PP8,PP14	Bahan Kajian: BK8 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar ilmu kealaman 2. Teknologi dan inovasi 3. Ilmu sosial dan alam 4. Etika ilmiah dan social 5. Analisis kebijakan ilmu alam 6. Literasi sains dan masyarakat 7. Studi kasus
10	U0013 1004	Pendidikan Kewarganegaraan	2	SIKAP: S2, S3,S4, S5,S6, S7, S8, KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KU14 PENGETAHUAN: PP1, PP3, PP5, PP8	Bahan Kajian: BK1,BK2 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan 2. Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia 4. Identitas Nasional 5. Negara 6. Konstitusi 7. Hak dan Kewajiban Warganegara 8. Demokrasi Hak Asasi Manusia 9. Otonomi Daerah (OTDA) 10. <i>Rule of Law</i> 11. <i>Good Governance</i> Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia
11	U0013 1005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2	SIKAP: S6,, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK7 PENGETAHUAN: PP8,PP14	Bahan Kajian: BK8 Materi Pembelajaran: 1. Pendidikan karakter 2. Etika dan moralitas dalam pemerintahan 3. Pemberantasan korupsi 4. Hukum dan peraturan anti korupsi 5. Budaya organisasi yang bersih 6. Kesadaran dan kewaspadaan

					7. Pendidikan dan kampanye anti korupsi 8. Penegakan hukum dan keadilan
12	U0013 1007	Kewirausahaan (Praktikum)	2	SIKAP: S6, S9, S10 KETERAMPILAN UMUM: KU2, KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2 PENGETAHUAN: PP1, PP10, PP11, PP14	Bahan Kajian: BK3 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar kewirausahaan pemerintahan 2. Identifikasi masalah dan peluang 3. Pengembangan inisiatif kewirausahaan 4. Kemitraan dan jejaring 5. Komunikasi dan presentasi 6. Etika dan tanggung jawab sosial 7. Studi kasus dan analisis
13	B0423 1003	Pemerintahan Nasional	3	SIKAP: S3, S4 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK13, KK15 PENGETAHUAN: PP1, PP4, PP6, PP16	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan 2. Tujuan dan fungsi pemerintahan 3. Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan 5. Lembaga dan birokrasi Pemerintahan nasional 6. Lembaga Legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, Pengadilan, dll) 7. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 8. Politik dan kebijakan pemerintahan 9. <i>Reinventing government</i> dan <i>good governance</i> 10. Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Nasional
14	U0013 1008	Kajian Lingkungan	2	SIKAP: S3, S5 Keterampilan Umum: Ku5 Keterampilan	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar lingkungan hidup 2. Prinsip-prinsip

		Hidup (Praktikum)		Khusus: Kk3,Kk4, Pengetahuan: PP1,PP10,PP11,PP14	ekologi 3. Perubahan iklim dan pemanasan global 4. Konservasi sumber daya alam 5. Kajian dampak lingkungan 6. Kebijakan lingkungan hidup
15	B0423 1004	Sosiologi Pemerintahan	3	SIKAP: S5, S6 KETERAMPILAN UMUM: KU 10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK 7, KK 15 PENGETAHUAN: PP 16, PP 22	Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran: 1. Konsep Dasar Sosiologi 2. Teori Teori Dasar Sosiologi 3. Fondamen Masyarakat 4. Fondamen Ketidakadilan Sosial 5. Perubahan sosial 6. Institusi Sosial
16	B0415 134	Filsafat Ilmu	3	SIKAP: S2,S5,S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3, KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK13, PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK1,BK5 Materi Pembelajaran: 1. Pengertian Logika 2. Kajian Filsafat 3. Pembagian Filsafat 4. Sistematis Filsafat 5. Ilmu dan Filsafat 6. Hakikat Ilmu 7. Filsafat alam dan Filsafat Moral 8. Sejarah Perkembangan ilmu Filsafat 9. Hakekat dan Karakteristik Ilmu Pengetahuan
17	B0015 102	Kurikulum II	1		
18	B0415 103	Sistem Politik Indonesia	3	SIKAP: S3,S4, KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUAN: PP1,PP4,PP7,PP16,	Bahan Kajian: BK 9 Materi Pembelajaran: 1. Pengertian Sistem Politik 2. Elemen– elemen pokok sistem politik 3. Mekanisme sistem politik 4. Perspektif: historis; struktural- fungsional; 5. budaya politik; 6. bisnis dan politik 7. Peran Masyarakat

					Kewarganegaraan dalam Sistem Politik Indonesia - Peran Media Massa dalam Sistem Politik Indonesia - Militer dalam Sistem Politik Indonesia - Bisnis dan Politik dalam sistem politik Indonesia - Masa depan sistem politik Indonesia Pengaruh globalisasi
19	B0423 1005	Hukum Pemerintahan (PPL)	3	SIKAP: S7, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK2, KK4 PENGETAHUAN: PP8, PP14	Bahan Kajian: BK 8 Materi Pembelajaran: - Aliran pemikiran hukum - Konsep tatanan hukum - Hukum sebagai persoalan keadilan - hukum sebagai sarana pembangunan - Makna Politik dan hukum - Politik hukum - Sejarah tata hukum di Indonesia - Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan - Politik hukum di Indonesia - Menata Sistem Hukum Nasional
20	B0423 1006	Pemerintahan Daerah	3	SIKAP: S3 S5 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK4, KK13 PENGETAHUAN: PP1, PP4, PP5, PP6, PP16, PP19, PP24	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: - Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah - Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. - Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah - Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan <i>Medebewind</i> - Otonomi Daerah - Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM, Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan) - Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) - Pemilihan Kepala Daerah - Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah - Tantangan-tantangan Pemerintahan Daerah - Masa Depan Pemerintahan Daerah

21	B0415 117	Pemerintahan Desa (PPL)	3	SIKAP: S4 S5 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK13, KK15 PENGETAHUAN: PP4, PP5, PP7, PP16, PP24	Bahan Kajian: BK 10 Materi Pembelajaran: 1. Berbagai Konsep dan Teori Pemerintahan Desa 2. Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia 3. Dinamika Perkembangan regulasi tentang Pemerintahan Desa 4. Tipe dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 5. Struktur kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa 6. Hubungan Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa 7. Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi pemerintah (eksekutif di Desa) 8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9. Jenis dan dinamika dalam regulasi pada Pemerintahan Desa 10. Keuangan Pemerintahan Desa 11. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 12. Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Kepala Desa)
22	B0415 123	Etika Pemerintahan	3	SIKAP: S1 , S2, S3, S5, S7 S8 KETERAMPILAN UMUM: KU9, KU11 KETERAMPILAN KHUSUS: KK10, KK14, KK15, KK16 PENGETAHUAN: PP26	Bahan Kajian: BK1 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Etika Pemerintahan 2. Teori dan Obyek Kajian Dalam Pemerintahan. 3. Efektivitas Etika Pemerintahan 4. Nilai-nilai Budaya Lokal untuk Memperkuat Etika Pemerintahan 5. Kebijakan Anti Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Kebijakan Anti Kolusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Kebijakan Anti Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 8. Strategi Penguatan Etika Pemerintahan 9. Tantangan-tantangan

					Etika Pemerintahan 10. Masa Depan Etika Pemerintahan
23	B0423 1007	Birokrasi Pemerintahan	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13 PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Birokrasi dalam Pemerintahan 2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan 9. Patologi Birokrasi Pemerintahan 10. Efektivitas Birokrasi Pemerintahan 11. Tantangan-Tantangan Birokrasi Pemerintahan 12. Masa Depan Birokrasi Pemerintahan
24	B0415 132	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	SIKAP: S6 S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU4,KU9 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK13,KK15 PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1. Ilmu Pemerintahan sebagai suatu Ilmu 2. Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan 3. Analisa konseptual Metodologi Ilmu Pemerintahan 4. Ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Ilmu Pemerintahan 5. Ilmu Pemerintahan sebagai suatu Ilmu 6. Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan 7. Analisa konseptual Metodologi Ilmu Pemerintahan 8. Metode dan pendekatan kualitatif dalam Analisa pemerintahan

25	B0415 130	Metode Peneliti an Ilmu Pemer intahan	3	SIKAP: S6 S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU4,KU9 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK13,KK15 PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK 5 Materi Pembelajaran: 1. Pengenalan metode penelitian 2. Desain penelitian 3. Pendekatan penelitian 4. Pengumpulan data 5. Analisis data 6. Interpretasi hasil 7. Etika penelitian 8. Presentasi dan publikasi 9. Penerapan penelitian 10. Tantangan dan peluang
26	B0423 1008	Tata Kelola Keuang an Pemer intahan	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU5,,KU7,KU8, KETERAMPILAN KHUSUS: KK7,KK8, PENGETAHUAN: PP18,PP20	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 2. Anggaran Publik 3. Pendekatan Penyusunan Anggaran 4. Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 5. APBN 6. Penyusunan RAPBN 7. Keuangan Daerah 8. APBD 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD) 10. Penyusunan RKA SKPD 11. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 12. Desentralisasi Fiskal 13. Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
27	B0423 1009	Global Govern ance & Perban dingan Pemer intahan	3	SIKAP: S5 KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,KK13,KK15 PENGETAHUAN: PP1,PP4,PP5,PP6,PP7	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Perbandingan Pemerintahan 2. Teori Perbandingan Pemerintahan 3. Teori dan Praktik Globalisasi 4. Perbandingan

					Sistem Pemerintahan - Perbandingan Bentuk Organisasi dan Struktur Pemerintahan - Perbandingan Fungsi Pemerintahan - Pemerintahan di negara-negara Maju - Pemerintahan di negara-negara Berkembang - Jejaring Pemerintahan Global - Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Global
28	B0423 1010	Digital Government (PPL)	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU4,KU5,,KU10,KU12 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,KK11,KK12 PENGETAHUAN: PP16,PP21,PP23	Bahan Kajian: BK4,BK6 Materi Pembelajaran; - Pengertian-pengertian - Kemunculan e-Government - Tujuan, Manfaat dan Ruang lingkup e- Government - Fase Perkembangan e- Government - Dimensi dan Relasi e- Government - Pembentukan Masyarakat Informasi - Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Manajemen Pemerintahan - Kebijakan e-Government di Indonesia - Elemen-elemen Sukses e- Government - Kajian e-Government di Beberapa Negara - Inovasi DalamTeknologi Pemerintahan - Tantangan dan Masa Depan Teknologi Pemerintahan
29	B0415 115	Tata Kelola SDM Pemerintahan	3	SIKAP: S3, S6, S9 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU5,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1,KK3,KK7,KK13 PENGETAHUAN: PP1,PP3,PP6,PP7PP16PP21,P24	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: - Arti Penting Tata Kelola Pemerintahan - Sejarah Tata Kelola Pemerintahan - Teori Tata Kelola Pemerintahan - Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Pemerintahan - Aktor Publik Dalam Governance - Aktor Privat Dalam Governance - Aktor Civil Sociey Dalam Governance

					8. Relasi atau Media antara Aktor Publik, Privat dan <i>Civil Society</i> 9. Faktor-Faktor Pokok Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan 10. Konteks dan Proses Dalam Tata Kelola Pemerintahan 11. Tantangan-Tantangan Dalam Tata Kelola Pemerintahan 12. Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan
30	B0423 1011	Pelaya nan Sektor Publik	3	SIKAP: S3 S6 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,,KK9,KK13,KK16 PENGETAHUAN: PP2,PP6.,PP10,PP16,PP21	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Konsepsi Dasar Tata kelola Pelayanan sektor Publik 2. Pendekatan dan Dimensi / Level Dalam tata kelola pelayanan sektor publik 3. Isu dalam Tata Kelola Pelayanan sektor Publik 4. Barang dan Jasa 5. Tata kelola Pelayanan Sektor Publik Dan sektor Privat 6. Kualitas Kinerja Pelayanan sektor Publik 7. Design peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Publik 8. Privatisasi Dalam Tata kelola pelayanan sektor Publik 9. Inovasi Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik: Penerapan <i>electronic goverment</i> 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia 8. Tantangan dan Masa Depan Pelayanan Sektor Publik
31	B0423 1012	Perenca naan Pemban gunan (PPL)	3	SIKAP: S3,S6 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU7,KU8 KETERAMPILAN KHUSUS:	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar perencanaan pembangunan 2. Konsep dasar pembangunan 3. Analisis kebutuhan dan masalah

				KK3, KK4, KK7, KK8 PENGETAHUAN: PP6, PP24	4. Pengembangan strategi pembangunan 5. Rencana tindak 6. Monev 7. Partisipasi masyarakat 8. Pengelolaan proyek pembangunan 9. Kebijakan pembangunan 10. Etika dan tata Kelola pembangunan
32	B0415 116	Kepemimpinan Pemerintahan	3	SIKAP: S9, S10 KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU2, KU7, KU8 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8, K K10, KK14, KK15, KK16 PENGETAHUAN: PP4, PP5, PP6, PP9, PP10, PP16, PP22	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pentingnya studi kepemimpinan dalam Ilmu Pemerintahan 2. Konsep dan pengertian Kepemimpinan pemerintahan 3. Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan 4. Model-model kepemimpinan 5. Kepemimpinan dalam organisasi sektor publik 6. Gaya-gaya dalam kepemimpinan 7. Fungsi Kepemimpinan dalam Pemerintahan 8. Hubungan Pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan 9. Efektivitas Kepemimpinan Pemerintahan 10. Kecakapan dan seni dalam kepemimpinan pemerintahan 11. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia 12. Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13. Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 14. Inovasi Kepemimpinan Pemerintahan 15. Tantangan dan Masa Depan Kepemimpinan Pemerintahan
33	B0423 1013	Kebijakan Sektor	3	SIKAP: S3 S6 KETERAMPILAN UMUM: KU3, KU5, KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK4, KK7	Bahan Kajian: BK 6 Materi Pembelajaran: 1. Ruang lingkup studi kebijakan

		Publik.		PENGETAHUAN: PP2,PP6,PP11,PP20	sektor publik 2. Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik 3. Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik 4. Isu Kebijakan dan Agenda <i>Setting</i> 5. Formulasi Kebijakan 6. <i>Forecasting</i> : 7. Rekomendasi Kebijakan 8. Implementasi Kebijakan
34	B0423 1014	Tata Kelola Penanggulangan Bencana (PPL)	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU7,KU8,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1,KK2,KK7,KK14,KK16 PENGETAHUAN: PP6,,PP19,PP20	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dasar bencana 2. Klasifikasi bencana 3. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana 4. Kebijakan penanggulangan bencana 5. Koordinasi dan kolaborasi 6. Komunikasi krisis 7. Pemulihan pasca bencana 8. Studi kasus dan pembelajaran dari pengalaman lapangan
35	B0415 133	Ekologi Pemerintahan	3	SIKAP: S5 S6, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4 PENGETAHUAN: PP10,,PP16,PP22,PP24	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dan Teori Ekologi Pemerintahan 2. Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi pemerintahan 3. Penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 4. Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan 5. Hubungan antar lembaga pemerintahan 6. Ekologi Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat 7. Peranan ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan 8. Kependudukan dan Sumber daya 9. Manusia dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

					10. Pengaruh ekologi pemerintahan Terhadap pewujudan <i>Good Governance</i>
36	B0423 1015	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (praktikum)	3	SIKAP: S3, S6 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU2,KU4,KU9,,KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK7,KK15 PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1. Pengertian Statistika 2. Pengukuran 3. Penyajian data kualitatif 4. Penyajian data kuantitatif 5. ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran 6. Probabilitas 7. Penarikan sampel probabilitas 8. Penarikan sampel non probabilitas 9. Estimasi dan uji hipotesis 10. Uji statistik hipotesis 11. Uji Hipotesis Dua Rata-rata Populasi
37	B0415 108	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia	3	SIKAP: S3,S4, S5 KETERAMPILAN UMUM: KU6 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK6,KK13 PENGETAHUAN: PP7,PP11.,PP16	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Sistem politik dan demokrasi di Indonesia 2. Sejarah pembentukan sistem kepartaian di Indonesia 3. Struktur dan peran partai politik 4. Peraturan dan regulasi Pemilu di Indonesia 5. Sistem Pemilu di Indonesia 6. Partisipasi politik dan pemilihan di Indonesia 7. Peran media massa dalam Pemilu 8. Kampanye politik dan komunikasi pemilihan
38	B0423 1016	IoT & Big Data/ PRAKTIKUM	3	SIKAP: S9 KETERAMPILAN UMUM: KU6,KU7,KU17 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1,KK8 PENGETAHUAN: PP2,PP6,PP19	Bahan Kajian: BK 6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar IoT 2. Teknologi dan infrastruktur IoT 3. Big data dalam konteks pemerintahan 4. Analisis dan interpretasi data 5. Keamanan dan privasi data 6. Etika dan regulasi 7. Kasus penggunaan dan studi kasus 8. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta 9. Dampak sosial dan lingkungan
39	B4015 106	Kajian Pemberdayaan dan	3	SIKAP: S3,, S4, S5,, S6 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3 KETERAMPILAN KHUSUS:	Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran: 1. Teori dan Konsep Sistem Sosial Budaya 2. Teori Ilmu Sosial dan Realitas

		Partisipasi Masyarakat (PPL)		KK3, KK13, KK15 PENGETAHUAN: PP10, PP16, PP22, PP24	Sosial 3. Manusia Sebagai Individu Dan Makhluk Sosial 4. Manusia Sebagai Makhluk Budaya 5. Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Derajat 6. Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan 7. Teori-Teori Evolusi Kebudayaan 8. Manusia dan Peradaban 9. Inovasi Norma Baru 10. Teori Modernisasi 11. Warga Negara dan Negara 12. Agama Dan Masyarakat 13. Multikulturalisme
40	B0415 118	Pengambilan Keputusan Strategik	3	SIKAP: S6 KETERAMPILAN UMUM: KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK5, KK6, KK12 PENGETAHUAN: PP 10, PP 15	Bahan Kajian: BK2, BK1 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dasar pengambilan keputusan 2. Model pengambilan keputusan 3. Teori organisasi dan pengambilan keputusan 4. Etika dalam pengambilan keputusan 5. Penggunaan data analisis 6. Kebijakan implementasi dan evaluasi
41	B0415 125	Pemerintahan dan Politik lokal	3	SIKAP: S3, S4 KETERAMPILAN UMUM: KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK4, KK8, K10, KK15 PENGETAHUAN: PP1, PP4, PP5, PP6, PP16, PP19, PP24	Bahan Kajian: BK9, BK11 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar pemerintahan dan politik lokal 2. Struktur pemerintahan lokal 3. Partisipasi masyarakat dan demokrasi lokal 4. Pemilu dan politik lokal 5. Otonomi daerah 6. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat
42	B0415 114	Manajemen Konflik	3	SIKAP: S2, S4, S5 KETERAMPILAN UMUM: KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK4, KK6, KK7, KK13, KK15, PENGETAHUAN: PP 10, PP 15	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar manajemen konflik 2. Faktor-faktor pemicu konflik 3. Strategi penyelesaian konflik 4. Metode penyelesaian konflik 5. Kebijakan konflik dan resolusi konflik 6. Keterlibatan masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik

43	B0415 113	Kajian Good Governance	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU6,KU12 KETERAMPILAN KHUSUS: KK9, KK11 PENGETAHUAN: PP15, PP21, PP23	Bahan Kajian: BK4, BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar good governance 2. Prinsip-prinsip good governance 3. Tantangan dan hambatan dalam penetapan good governance 4. Pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan 5. Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non pemerintah
44	B0423 1017	Civil Society & Demokrasi (PPL)	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2, KU7, KU8, KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2, KK7, KK14, KK16 PENGETAHUAN: PP6, PP19, PP20	Bahan kajian: BK6 Materi pembelajaran: 1. Pengertian civil society 2. Peran civil society dalam demokrasi 3. Hubungan antara civil society dan pemerintah 4. Demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil 5. Penyelenggaraan civil society 6. Etika dan tanggungjawab masyarakat sipil 7. Isu-isu kontemporer dalam masyarakat sipil 8. Pengaruh global terhadap civil society
45	B0423 1018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan (PPL)	3	SIKAP: S7 S9 KETERAMPILAN UMUM: KU5, KU7, KU8 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4, KK10, KK14, KK16 PENGETAHUAN: PP17	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar monitoring dan evaluasi pemerintahan 2. Kerangka kerja M&E 3. Peran pemerintah dalam M&E 4. Pengembangan indikator kinerja 5. Evaluasi kebijakan dan program 6. Keterlibatan stakeholder 7. Aspek etika dalam M&E 8. Manajemen informasi dan sistem pelaporan
46	B0015 103	Kuliah kerja nyata (KKN)	4	SIKAP: S7 S9 KETERAMPILAN UMUM: KU5, KU7, KU8 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3, KK4, KK8, KK10, KK15 PENGETAHUAN: PP16, PP22	Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran: 1. Pengabdian masyarakat 2. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat 3. Penelitian dan pengembangan lokal 4. Kewirausahaan sosial 5. Pemberdayaan masyarakat 6. Pengembangan kemampuan soft

					skills 7. Evaluasi dan pelaporan
47	B0423 1019	Peneliti an Mandiri & Propos al Karya Ilmiah	2	SIKAP: S3,S4 KETERAMPILAN UMUM: KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4,KK8,K K10,KK15 PENGETAHUAN: PP12, PP13	Bahan Kajian: BK9,BK11 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar penelitian mandiri 2. Perumusan masalah penelitian 3. Pengembangan kerangka konseptual 4. Metodologi penelitian 5. Penyusunan proposal penelitian 6. Tinjauan pustaka dan review literature 7. Penyusunan rencana kerja 8. Etika penelitian 9. Presentasi proposal penelitian 10. Umpan balik dan revisi proposal 11. Manajemen proyek penelitian 12. Sumber daya penelitian
48	B0015 104	Skripsi	4	SIKAP: S9,S10 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU4,KU5,KU9,KU11 KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK3,KK4,KK7, KK12, KK 13, KK15 PENGETAHUAN: PP12, PP13	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1. Pemahaman tentang skripsi 2. Penulisan skripsi 3. Presentasi skripsi 4. Konsultasi dan umpan balik 5. Etika penelitian 6. Manajemen waktu dan proyek
49	B0415 112	Kajian Organis asi Sosial Politik Indones ia	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU7,KU8,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2, KK7, KK14, KK16 PENGETAHUAN: PP6, PP19, PP20	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Sejarah politik Indonesia 2. Sistem politik Indonesia 3. Organisasi masyarakat sipil 4. Gerakan sosial dan politik 5. Politik identitas 6. Media massa dan politik 7. Politik luar negeri indonesia
50	B0423 1020	Kajian Kelemb agaan Masyar akat Lokal	3	SIKAP: S5 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,,KK13 PENGETAHUAN: PP5, PP10,, PP16, PP24	Bahan Kajian: BK2,BK11 Materi Pembelajaran: 1. Pengertian Lembaga masyarakat lokal 2. Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal 3. Klasifikasi Lembaga masyarakat lokal 4. Hubungan antara Lembaga masyarakat lokal dengan pemerintah 5. Keberlanjutan Lembaga

					masyarakat lokal 6. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam Lembaga lokal
51	B0423 1021	Statistik dan Data Science	3	SIKAP: S1,S2,S5 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3,KU 5,KU9,KU12 KETERAMPILAN KHUSUS: KK7, KK9, KK11 PENGETAHUAN: PP 23	Bahan Kajian: BK4 Materi Pembelajaran: 1. Konsep dasar 2. Sistem Komputer 3. Sistem Telekomunikasi 4. Sistem Jaringan 5. Pengantar SIM 6. Pengantar Basis 7. Aplikasi TI
52	B0415 135	Psikologi Pemerintahan	3	SIKAP: S3,S6 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4,,KK13,KK15 PENGETAHUAN : PP10,PP11,PP12	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar psikologi pemerintahan 2. Teori kepemimpinan 3. Pengambilan keputusan 4. Komunikasi politik 5. Perilaku organisasi 6. Psikologi politik 7. Stres dan kesejahteraan pegawai pemerintahan 8. Studi kasus dan analisis psikologis
53	B0424 1002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan	3	SIKAP: KETERAMPILAN UMUM: KETERAMPILAN KHUSUS: PENGETAHUAN	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1.I;l 2.I;
54	B0423 1022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa	3	SIKAP: S2, S7, S9 KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU2, KU5, KU9 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran: 1. Pengantar Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa 2. Perencanaan logistik dan pengadaan 3. Pengadaan barang jasa publik 4. Regulasi pengadaan barang jasa 5. Etika dan transparansi dalam pengadaan 6. Teknologi informasi dalam manajemen logistik
55	B0423 1023	Studi Gender	3	SIKAP: S2, S3, S5, KETERAMPILAN UMUM: KU1, KU3,	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran: 1. Pengantar studi gender 2. Teori gender

				KETERAMPILAN KHUSUS: KK4, KK7, KK14, KK15 PENGETAHUAN: PP1, PP10, PP15, PP16, PP22, PP24	3. Sejarah Gerakan gender 4. Analisis kekuasaan dan kebijakan berspektif gender 5. Partisipasi politik dan pemimpin perempuan 6. Gender dan pembangunan 7. Pengaruh gender dalam proses pengambilan keputusan
56	B0423 1024	Kajian Kedaruratan Bencana	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU7,KU8,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1, KK2, KK7, KK14, KK16 PENGETAHUAN: PP6,,PP19,PP20	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran: 1. Pengenalan bencana 2. Peran pemerintah dalam kedaruratan bencana 3. Sistem manajemen bencana 4. Perencanaan kedaruratan bencana 5. Respons darurat 6. Komunikasi krisis 7. Logistic dan pengadaan bantuan 8. Pemulihan pasca bencana 9. Kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana
57	B0415 129	Seminar Masalah pemerintahan	3	SIKAP: S3, S6 KETERAMPILAN UMUM: KU10,,KU11,KU12 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4, KK8, KK12, KK15, KK16 PENGETAHUAN: : PP21, PP23	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar penelitian dalam ilmu pemerintahan 2. Perumusan masalah penelitian 3. Penyusunan kerangka konseptual 4. Desain penelitian 5. Etika penelitian 6. Presentasi hasil penelitian 7. Pengembangan keterampilan penelitian
	B0424 1003	Resolusi Konflik	3	SIKAP: KETERAMPILAN UMUM: KETERAMPILAN KHUSUS: PENGETAHUAN	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1.I;l 2.I;

11. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada

Pasal 4 ayat (1) Permendikbud No. 20 Tahun 2020, yaitu memenuhi standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian pendidikan Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran; dan, standar pembiayaan Pembelajaran.

Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan meliputi penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Program studi ilmu pemerintahan FISIP Untad secara rutin dalam satu tahun sekali melakukan dialog akademik dan selama empat tahun sekali melakukan peninjauan kurikulum guna menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Setiap kegiatan akademik dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang di monitoring dan evaluasi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Universitas Tadulako dalam melaksanakan standar pengelolaan tersebut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

12. Penutup

Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2024 ini merupakan rekonstruksi ulang atau revisi dari kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2023. Rekonstruksi kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan didasarkan pada beberapa kebijakan diantaranya dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1319/ UN.28/ KR/2024, Tentang Penetapan SKS Mata Kuliah Wajib Nasional, Umum, Dan Sains Dasar di Lingkungan Untad.

Penyelarasan terhadap kebijakan tersebut menuntut Kurikulum program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan mesti mengalami perubahan sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang sesuai aturan dan berbasiskan kepada OBE (*out come base education*). Hal ini merupakan bagian dari penyelarasan terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penyelarasan terhadap kurikulum yang disusun oleh Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Se- Indonesia berbasis *outcome based education* (OBE), serta adaptasi terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 dan 5.0.